



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KPKNL  
JAKARTA I**



**2021**

**LAPORAN KINERJA  
KPKNL JAKARTA I**

# **DAFTAR ISI**

**DAFTAR ISI i**  
**KATA PENGANTAR ii**  
**RINGKASAN EKSEKUTIF iii**

## **BAB I PENDAHULUAN-1**

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi-1
- B. Peran Strategis-5
- C. Sistematika Laporan-6

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA-7**

- A. Penetapan/Perjanjian Kinerja-7
- B. Pengukuran Kinerja-8

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA-9**

- A. Capaian Kinerja Organisasi-9
- B. Realisasi Anggaran-22

## **BAB IV PENUTUP-24**

**Lampiran:**

- **Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Jakarta I pada Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada pengguna jasa.

Laporan Kinerja disusun untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Jakarta I telah menerapkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai instrumen manajemen kinerja. Performa KPKNL Jakarta I dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Jakarta I dengan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 ini adalah berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021, diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Jakarta I Tahun 2021 sebesar 111,18%%.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPKNL Jakarta I dalam mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kepala Kantor,  
  
Wildan Ahmad Fananto

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2021 merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN menuju *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2021 merupakan bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian visi DJKN yaitu ***"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"***.

Untuk mendukung pencapaian visi DJKN tersebut, KPKNL Jakarta I mempunyai visi ***"Mengelola kekayaan negara secara profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di lingkungan KPKNL"***.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, KPKNL Jakarta I mempunyai 5 misi yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Jakarta I adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna dan optimal serta mampu membangun citra yang baik bagi pengguna jasa.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continously Improved*). Pada tahun 2021 terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) IKU yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Jakarta I dengan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta. Secara umum pencapaian IKU pada Tahun 2021 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, terdapat 2 (dua) IKU yang berada di bawah target. IKU yang belum mencapai target yaitu Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikasi dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

KPKNL Jakarta I tidak akan berpuas diri dengan hasil yang telah diraih di Tahun 2021. Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan rencana aksi yang relevan. KPKNL Jakarta I akan terus bekerja dengan semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan Integritas, Profesional, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi dan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.



Kepala Kantor,

*Wildan*  
Wildan Ahmad Fananto

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016, disebutkan bahwa KPKNL merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebagai unit instansi vertikal, KPKNL melaksanakan tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, pelayanan lelang dan piutang negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;

11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara susunan organisasi KPKNL Jakarta I adalah sebagai berikut:



**Keterangan:**

Kepala Kantor: **Wildan Ahmad Fananto**

Kasubbag Umum: **Carolina Deny Chrismayanti**

Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara: **Gunawan Hartanto**

Kasi Pelayanan Penilaian: **Sapto Sumunu**

Kasi Piutang Negara: **Iraningsih**

Kasi Pelayanan Lelang: **Engkus Kusumah Permana**

Kasi Hukum dan Informasi: **Basri**

Kasi Kepatuhan Internal: **Sri Wahyuni**

Sumber daya manusia yang ada di lingkungan KPKNL Jakarta I per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 45 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

| TINGKAT PENDIDIKAN | GOLONGAN |          |           |          | JUMLAH    |
|--------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|                    | I        | II       | III       | IV       |           |
| S3                 | -        | -        | -         | -        | -         |
| S2                 | -        | -        | 2         | 4        | 6         |
| S1/D IV            | -        | 1        | 26        | -        | 27        |
| D III              | -        | 5        | 2         | -        | 7         |
| SLTA/D I           | -        | 1        | 4         | -        | 5         |
| SLTP               | -        | -        | -         | -        | -         |
| SD                 | -        | -        | -         | -        | -         |
| <b>TOTAL</b>       | -        | <b>7</b> | <b>34</b> | <b>4</b> | <b>45</b> |

2. Berdasarkan Gender

| JENIS KELAMIN | Golongan |          |           |          | JUMLAH    |
|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|               | I        | II       | III       | IV       |           |
| Perempuan     | -        | 3        | 16        | 4        | 23        |
| Laki-laki     | -        | 3        | 17        | 2        | 22        |
| <b>TOTAL</b>  | -        | <b>6</b> | <b>33</b> | <b>6</b> | <b>45</b> |

3. Tenaga Fungsional

| No | Jabatan Fungsional            | Jumlah |
|----|-------------------------------|--------|
| 1  | Fungsional Pelelang           | 5      |
| 2  | Fungsional Penilai Pemerintah | 5      |
| 3  | Juru Sita                     | 3      |
| 4  | Pejabat Lelang                | 3      |
| 5  | Penilai                       | 2      |
| 6  | Pemeriksa                     | 2      |

Tugas dan fungsi KPKNL Jakarta I berdasarkan Perdirjen Kekayaan Negara No. 9/KN/2017 adalah memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pelayanan penilaian Barang Milik Negara (BMN) kepada pengguna jasa yang berada di wilayah kerja KPKNL Jakarta I, yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan penilaian BMN:

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Koordinasi Penanamam Modal, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman Republik Indonesia, Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Jakarta Pusat, Hak atas Kekayaan Intelektual, Benda Cagar Budaya yang Belum Ditetapkan Statusnya Sebagai BMN, dan Aset Eks. Bank Dalam Likuidasi.

2. Pengurusan Piutang Negara:

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Pusat Statistik, Badan Standardisasi Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Ombudsman Republik Indonesia, DJKN (Piutang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham [PKPS] eks penanganan Kejaksaan), Aset Kredit eks. BPPN yang dilimpahkan ke KPKNL Jakarta I, dan Pemda DKI Jakarta.

3. Pelayanan Lelang:

Eksekusi PUPN dari KPKNL Jakarta I, Balai Lelang, Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama/ Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Lingkup Kanwil DJP Jakarta Pusat, Lelang Eksekusi sitaan Lingkup Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Harta Pailit/ Kurator domisili di Jakarta Pusat, Hak Tanggungan Kreditur Bank (PT Bank Mandiri, PT Bank Syariah Mandiri, Standard Chartered Bank, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, PT Bank OCBC NISP), Fidusia domisili Kreditur di Jakarta Pusat, Kementerian/Lembaga Negara, Badan Layanan Umum dan Pemohon Lelang Lainnya yang termasuk dalam Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta I, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah domisili di Jakarta Pusat, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah domisili di Jakarta Pusat, Balai Harta Peninggalan, Sukarela domisili Pemohon di Jakarta Pusat, Bank Dalam Likuidasi domisili di Jakarta Pusat, Pemohon Lelang domisili di luar Provinsi DKI Jakarta.

## B. Peran Strategis

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta I memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan kekayaan negara;

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta I turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Jakarta I selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Memberikan pelayanan pengurusan Piutang Negara;

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, pengurusan piutang negara difokuskan kepada piutang negara instansi pemerintah.

3. Memberikan pelayanan lelang;

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. KPKNL Jakarta I tidak hanya melaksanakan lelang eksekusi tetapi juga melaksanakan lelang sukarela. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *Akta Van Transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Jakarta I diharapkan dapat berperan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap ke dalam pola pikir masyarakat, bahwa lelang adalah instrumen jual beli yang menguntungkan, sehingga berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Memberikan kontribusi pemasukan PNBPN ke Kas Negara

Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang termasuk Bea Lelang Pegadaian. Kedua penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

### **C. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang ringkasan penetapan/perjanjian kinerja dan metode yang digunakan dalam mengukur kinerja tahun 2021.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja beserta analisisnya dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan uraian atas realisasi anggaran yang digunakan.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

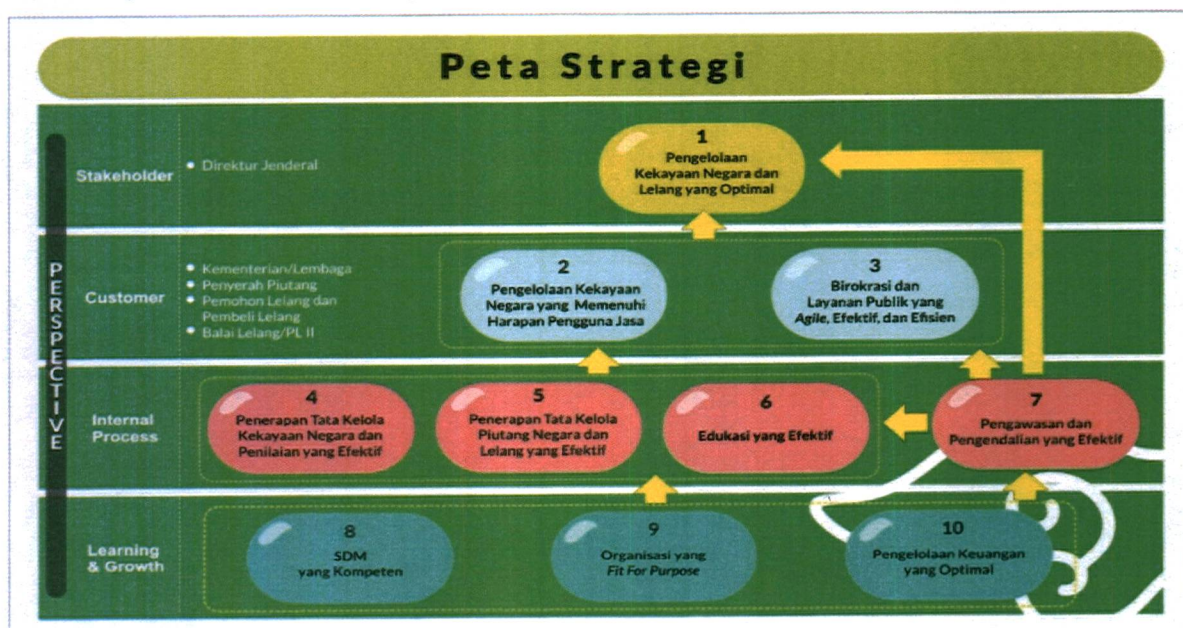
### A. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal, visi dan misi KPKNL Jakarta I menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS) sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor 7/KN.19/2021.

Sasaran Strategis KPKNL Jakarta I Tahun 2021 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta I. Peta Strategi KPKNL Jakarta I Tahun 2021 memuat 10 Sasaran Strategis (SS) yaitu (1) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien; (4) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif; (5) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif; (6) Edukasi yang efektif; (7) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif; (8) SDM yang Kompeten; (9) Organisasi yang *fit-for-purpose*; (10) Pengelolaan Keuangan yang Optimal.

Peta strategi KPKNL Jakarta I mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*. Dari peta strategi KPKNL Jakarta I tahun 2021 tersebut untuk mencapai 10 SS telah diidentifikasi sebanyak 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).



## B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja, KPKNL Jakarta I berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lain;
3. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
4. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
  - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Rincian capaian kinerja atas 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Jakarta I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### SS 1 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

##### 1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

|                           | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020       | Tahun 2021          |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------|
| Target                    | -          | -          | -          | 100%<br>(99 NUP) | 62%<br>(273 NUP)    |
| Realisasi                 | -          | -          | -          | 100%<br>(99 NUP) | 78,86%<br>(274 NUP) |
| <b>Persentase capaian</b> | -          | -          | -          | <b>100%</b>      | <b>127,2%</b>       |

IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK mulai diukur kinerjanya pada tahun 2020. Namun, terdapat perubahan formula penghitungan IKU ini di tahun 2021, yang sebelumnya hanya menghitung jumlah BMN yang telah diukur tingkat kesesuaian penggunaannya dengan SBSK, untuk tahun ini formulanya tidak hanya diukur dari jumlah BMN yang menjadi target, melainkan juga melingkupi perhitungan pengukuran dan optimalisasi.

Realisasi IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2021 adalah sebesar 127,2%. Jika dilihat dari jumlah NUP BMN yang menjadi target, KPKNL Jakarta I berhasil menyelesaikan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK atas 274 NUP dari target 273 NUP.

##### 2. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

|                           | Tahun 2017                   | Tahun 2018                    | Tahun 2019                     |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Target                    | 100%<br>(Rp4.000.000.000)    | 100%<br>(Rp17.085.628.001)    | 100%<br>(Rp82.114.405.721)     |
| Realisasi                 | 220,50%<br>(Rp8.000.000.000) | 115,87%<br>(Rp20.952.271.152) | 105.80%<br>(Rp106.958.949.890) |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>120%</b>                  | <b>115,87%</b>                | <b>105.80%</b>                 |

|                           | Tahun 2020                    | Tahun 2020                     |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Target                    | 100%<br>(Rp46.595.194.894,02) | 100%<br>(Rp80.035.000.000)     |
| Realisasi                 | 179.41%<br>(Rp83.596.300.898) | 147.73%<br>(Rp118.231.592.390) |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>179.41%</b>                | <b>147.73%</b>                 |

Realisasi IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp118.231.592.390,00. IKU ini mulai diukur kinerjanya pada tahun 2017. Realisasi tersebut didapat dari :

1. Realisasi nominal PNBPN Aset sebesar Rp81.233.797.835,00
2. Realisasi nominal PNBPN PN sebesar Rp17.150.738.135,00
3. Realisasi nominal PNBPN Lelang sebesar Rp19.847.056.420,00

IKU tersebut bukan merupakan salah satu indikator kinerja yang tercantum di dalam Renstra KPKNL Jakarta I Tahun 2020 – 2024.

### 3. Persentase Penurunan Nilai *Outstanding* Piutang Negara

IKU Persentase Penurunan Nilai *Outstanding* Piutang Negara merupakan IKU baru di Tahun 2020. Sebelumnya IKU ini merupakan komponen perhitungan untuk IKU Persentase hasil pengurusan piutang negara. Realisasi Persentase Hasil Pengurusan Piutang Negara pada tahun 2019 merupakan gabungan dari Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan dan Jumlah BKPN yang Dapat Diselesaikan.

|                           | Tahun 2017       | Tahun 2018       | Tahun 2019         |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Target                    | Rp21.000.000.000 | Rp25.500.000.000 | Rp25.500.000.000   |
| Realisasi                 | Rp22.155.233.575 | 1.714.415.981    | Rp8.865.516.436,17 |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>105,50%</b>   | <b>6,72%</b>     | <b>34,77%</b>      |

|                           | Tahun 2020   | Tahun 2021           |
|---------------------------|--|----------------------|
| Target                    | Rp241.655.058.525<br>(3% dari total Nilai Outstanding Piutang Negara dengan Berkas s.d. 31 Desember 2016 /Realisasi PNDS dengan kriteria berkas sd 31 Desember 2016    | Rp261.983.673.163,57 |
| Realisasi                 | Rp167.069.926.416<br>(2,07% dari total Nilai Outstanding Piutang Negara dengan Berkas s.d. 31 Desember 2016 /Realisasi PNDS dengan kriteria berkas sd 31 Desember 2016 | Rp485.564.042.443,12 |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>69%</b>   | <b>185,34%</b>       |

IKU Tingkat *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31

Desember 2017, sebagai berikut: Angsuran; Pelunasan; Penarikan/ Pengembalian; Pelunasan; PSBDT; dan Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021.

Realisasi jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan pada tahun 2021 adalah sebesar 185,34% dari target dan meningkat signifikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

## SS 2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

### 4. Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang

|                           | Tahun 2017     | Tahun 2018     | Tahun 2019     |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Target                    | 100%           | 80             | 85             |
| Realisasi                 | 114,40%        | 92,21          | 93,35          |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>114,40%</b> | <b>115,27%</b> | <b>109,83%</b> |

|                           | Tahun 2020     | Tahun 2021     |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Target                    | 90             | 90             |
| Realisasi                 | 99,72          | 99,35          |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>110,80%</b> | <b>110,39%</b> |

IKU ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang mulai diukur dengan satuan pengukuran indeksasi sejak tahun 2018, sebelumnya IKU ini diukur dengan satuan pengukuran persentase. Realisasi indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 adalah 99,35. Pencapaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90.

### 5. Persentase Realisasi Pokok Lelang

|                           | Tahun 2017  | Tahun 2018     | Tahun 2019    |
|---------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Target                    | 100%        | 100%           | 100%          |
| Realisasi                 | 127,89%     | 105,67%        | 77,06%        |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>120%</b> | <b>105,67%</b> | <b>77,06%</b> |

|                           | Tahun 2020     | Tahun 2021     |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Target                    | 100%           | 100%           |
| Realisasi                 | 121,43%        | 121,95%        |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>121,43%</b> | <b>121,95%</b> |

Realisasi Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) pada tahun 2021 adalah 121,95%. Pencapaian tersebut lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. IKU Realisasi Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) merupakan gabungan dari Target/realisasi pokok lelang kelas I dan Target/realisasi pokok lelang pegadaian.

Perhitungan pencapaian IKU ini pada tahun 2021 menggunakan formula:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I dan JFP)} + \text{Pegadaian}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL (PL I dan JFP)} + \text{Pegadaian}}$$

Adapun rincian pencapaian sub-sub IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pokok Lelang Kelas I

|                           | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019        |
|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| Target                    | n/a        | n/a        | Rp359.717.000.000 |
| Realisasi                 | n/a        | n/a        | Rp277.987.285.678 |
| <b>Persentase capaian</b> | -          | -          | <b>77,28%</b>     |

|                           | Tahun 2020        | Tahun 2021        |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Target                    | Rp360.000.000.000 | Rp383.000.000.000 |
| Realisasi                 | Rp483.308.581.132 | Rp416.604.964.000 |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>134%</b>       | <b>109%</b>       |

Realisasi Jumlah Pokok Lelang Kelas I pada tahun 2021 adalah sebesar Rp416.604.964.000 atau melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp383.000.000.000.

b. Jumlah Pokok Lelang Pegadaian.

|                           | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019        |
|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| Target                    | n/a        | n/a        | Rp128.450.000.000 |
| Realisasi                 | n/a        | n/a        | Rp98.189.732.400  |
| <b>Persentase capaian</b> | -          | -          | <b>76,44%</b>     |

|                           | Tahun 2020       | Tahun 2021        |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Target                    | Rp98.200.000.000 | Rp94.000.000.000  |
| Realisasi                 | Rp73.089.188.300 | Rp165.080.089.000 |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>74%</b>       | <b>176%</b>       |

Realisasi Jumlah Pokok Lelang Pegadaian pada tahun 2021 adalah sebesar Rp165.080.089.000. Pencapaian tersebut tidak dapat mencapai dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp94.000.000.000.

### SS 3 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

#### 6. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

|                           | Tahun 2017     | Tahun 2018     | Tahun 2019     |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Target                    | 4,22           | 4,36           | 4,51           |
| Realisasi                 | 4,36           | 4,51           | 4,62           |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>103,32%</b> | <b>103,44%</b> | <b>102,44%</b> |

|                           | Tahun 2020     | Tahun 2021     |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Target                    | 4,62           | 4,64           |
| Realisasi                 | 4,77           | 4,82           |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>103,25%</b> | <b>103,88%</b> |

Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2021 adalah sebesar 4,82. Pencapaian tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,64. Rincian nilai masing-masing layanan adalah sebagai berikut :

| No.             | Layanan                     | Total Indeks |
|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 1               | Pengelolaan Kekayaan Negara | 4.89         |
| 2               | Piutang Negara              | 4.81         |
| 3               | Pelayanan Penilaian         | 4.85         |
| 4               | Pelayanan Lelang            | 4.75         |
| Indeks Kepuasan |                             | 4.82         |

### SS 4 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

#### 7. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikasi.

|                           | Tahun 2017  | Tahun 2018  | Tahun 2019  |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Target                    | 75%         | 100%        | 100%        |
| Realisasi                 | 100%        | 200%        | 100%        |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>120%</b> | <b>120%</b> | <b>100%</b> |

|                           | Tahun 2020 | Tahun 2021    |
|---------------------------|------------|---------------|
| Target                    | 0          | 100%          |
| Realisasi                 | 0          | 45,45%        |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>-</b>   | <b>45,45%</b> |

Pada tahun 2020, target sertipikasi pada KPKNL Jakarta I yang semula 9 (sembilan) bidang tanah di-adendum menjadi sejumlah 0 bidang tanah dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan upaya penyelesaian sertipikat tanah, seperti survey lapangan, tidak dapat dijalankan. Selanjutnya, pada tahun 2021, target sertipikasi pada KPKNL Jakarta I adalah 22 (dua puluh dua) bidang tanah. Sampai dengan 31 Desember 2021 baru 10 (sepuluh) bidang tanah BMN yang dapat terbit sertipikat tanahnya sehingga realisasi mencapai 45,45% dari target yang telah ditetapkan. KPKNL Jakarta I telah melakukan himbauan kepada Satuan Kerja untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan.

Beberapa masalah yang dihadapi yaitu kurangnya dokumen kepemilikan tanah satker yang menjadi objek sertifikasi yang dipersyaratkan untuk dilengkapi dalam rangka penerbitan sertipikat tanah. Selain itu terdapat perbedaan luas antara data luasan bidang tanah di SIMAN dengan hasil pengukuran Kantor Pertanahan.

#### 8. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

|                           | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Target                    | -          | -          | -          |
| Realisasi                 | -          | -          | -          |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

|                           | Tahun 2020        | Tahun 2021           |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Target                    | 100%<br>(98 NUP)  | 100%<br>(157 NUP)    |
| Realisasi                 | 100%<br>(134 NUP) | 103,82%<br>(163 NUP) |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>136,73%</b>    | <b>103,82%</b>       |

IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) baru mulai diukur pada tahun 2020. Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Realisasi IKU implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2021 dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 163 NUP dari target 157 NUP dengan persentase capaian sebesar 103,82%.

#### 9. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

|                           | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Target                    | -          | -          | -          |
| Realisasi                 | -          | -          | -          |
| <b>Persentase capaian</b> | -          | -          | -          |

|                           | Tahun 2020     | Tahun 2021     |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Target                    | 30%            | 22%            |
| Realisasi                 | 4,21%          | 1,90%          |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>185,98%</b> | <b>191,36%</b> |

IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian baru mulai diukur pada tahun 2020. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Realisasi IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2021 adalah sebesar 1,90% dari target 22% (polarisasi IKU minimize atau pencapaian semakin kecil akan semakin bagus).

### SS 5 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

#### 10. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

|                           | Tahun 2017     | Tahun 2018     | Tahun 2019  |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Target                    | 86 BKPN        | 85 BKPN        | 10 BKPN     |
| Realisasi                 | 98 BKPN        | 89 BKPN        | 33 BKPN     |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>113,95%</b> | <b>104,71%</b> | <b>330%</b> |

|                           | Tahun 2020  | Tahun 2021     |
|---------------------------|---|----------------|
| Target                    | 33 BKPN   | 33 BKPN        |
| Realisasi                 | 31 BKPN<br>(nilai menjadi 34,5 dengan pembobotan) | 71 BKPN        |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>104,55%</b>                                    | <b>215,15%</b> |

IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN baru mulai diukur pada tahun 2020. Sebelumnya IKU ini merupakan komponen perhitungan untuk IKU Persentase hasil pengurusan piutang negara. Realisasi Persentase Hasil Pengurusan Piutang Negara pada tahun 2019 merupakan gabungan dari Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan dan Jumlah BKPN yang Dapat Diselesaikan. IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Realisasi Jumlah BKPN yang Dapat Diselesaikan (Lunas, Ditarik, PSBDT, Dikembalikan) pada tahun 2021 sebesar 71 BKPN dari target 33 BKPN. Persentase capaian mencapai 215,15%.

#### 11. Persentase produktifitas lelang

|                           | Tahun 2017 | Tahun 2018  | Tahun 2019     |
|---------------------------|------------|-------------|----------------|
| Target                    | n/a        | 30%         | 32%            |
| Realisasi                 | n/a        | 39,12%      | 36,43%         |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>-</b>   | <b>120%</b> | <b>113.85%</b> |

|                           | Tahun 2020     | Tahun 2021     |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Target                    | 34%            | 35%            |
| Realisasi                 | 37,43%         | 39,41%         |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>110,08%</b> | <b>112,61%</b> |

Realisasi IKU Presentase produktifitas lelang pada tahun 2021 adalah sebesar 39,41%. Capaian tersebut lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 35%. Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi

lelang yang laku, yaitu dengan membandingkan jumlah frekuensi lelang yang laku (255 frekuensi) dengan jumlah frekuensi lelang secara keseluruhan (647 frekuensi) pada tahun 2021.

12. Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*

|                           | Tahun 2017 | Tahun 2018     | Tahun 2019     |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|
| Target                    | n/a        | 85%            | 90%            |
| Realisasi                 | n/a        | 94.02%         | 99.49%         |
| <b>Persentase capaian</b> | -          | <b>110,61%</b> | <b>110.54%</b> |

|                           | Tahun 2020     | Tahun 2021     |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Target                    | 90%            | 92%            |
| Realisasi                 | 100%           | 100%           |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>111,11%</b> | <b>108,70%</b> |

Realisasi IKU Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* 2020 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92%. Produktivitas lelang dinilai dari berapa intensitas frekuensi lelang yang dilaksanakan secara *e-auction* maupun *e-conventional auction*. Dalam hal ini lelang di KPKNL Jakarta I telah dilaksanakan secara *e-auction* seluruhnya.

13. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

|                           | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Target                    | -          | -          | -          |
| Realisasi                 | -          | -          | -          |
| <b>Persentase capaian</b> | -          | -          | -          |

|                           | Tahun 2020 | Tahun 2021     |
|---------------------------|------------|----------------|
| Target                    | -          | 12,50%         |
| Realisasi                 | -          | 0,00%          |
| <b>Persentase capaian</b> | -          | <b>200,00%</b> |

IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN merupakan IKU baru di tahun 2021 ini. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi

- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang\* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Realisasi Data PNBP Fungsional DJKN pada tahun 2021 adalah sebesar 0,00% dari target 12,50% (polarisasi IKU minimize atau pencapaian semakin kecil akan semakin bagus) atau tidak ada deviasi data PNBP Fungsional DJKN di KPKNL Jakarta I.

## SS 6 Edukasi yang efektif

14. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi.

|                           | Tahun 2017     | Tahun 2018     | Tahun 2019     |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Target                    | 85             | 88             | 90             |
| Realisasi                 | 87,47          | 90             | 93             |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>102,90%</b> | <b>102,27%</b> | <b>103,33%</b> |

|                           | Tahun 2020     | Tahun 2021     |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Target                    | 93             | 93             |
| Realisasi                 | 94,15          | 94,15          |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>101,24%</b> | <b>101,24%</b> |

Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2021 adalah sebesar 94,15. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 93. Capaian Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi dari tahun ke tahun melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilakukan sudah cukup efektif.

## SS 7 Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

15. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

|                           | Tahun 2017 | Tahun 2018  | Tahun 2019     |
|---------------------------|------------|-------------|----------------|
| Target                    | n/a        | 50%         | 70%            |
| Realisasi                 | n/a        | 88%         | 87,21%         |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>-</b>   | <b>176%</b> | <b>124,59%</b> |

|                           | Tahun 2020    | Tahun 2021     |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Target                    | 80%           | 85%            |
| Realisasi                 | 82%           | 100%           |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>102,5%</b> | <b>117,65%</b> |

Realisasi Persentase tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada tahun 2021 adalah sebesar 100%, artinya seluruh produk persetujuan pengelolaan kekayaan negara yang diterbitkan oleh KPKNL Jakarta I telah ditindak lanjuti oleh satuan kerja seluruhnya. Pengukuran kinerja IKU ini dapat tercapai dikarenakan KPKNL Jakarta I rutin melakukan pembinaan pada satker melalui sosialisasi dan surat.

16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

|                           | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Target                    | n/a        | n/a        | n/a        |
| Realisasi                 | n/a        | n/a        | n/a        |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

|                           | Tahun 2020 | Tahun 2021     |
|---------------------------|------------|----------------|
| Target                    | n/a        | 97%            |
| Realisasi                 | n/a        | 100%           |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>-</b>   | <b>103,09%</b> |

Realisasi Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan IKU baru pada tahun 2021 dikarenakan terdapat hasil pengawasan Itjen yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan adalah serangkaian proses kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen yang telah ditetapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Rekomendasi *teamcentral* adalah operasional/administratif adalah rekomendasi dari ITJEN yang berkaitan dengan penerapan kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku (selain polrec). Saldo rekomendasi adalah saldo mulai tahun 2012 ditambah saldo periode tahun sebelum tahun berjalan (2020) yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2021.

Rekomendasi yang selesai/ditetapkan tuntas dihitung berdasarkan:

1. Status rekomendasi telah closed-verified pada TeamCentral

2. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (sesuai ketentuan pada PMK 237/PMK.09/2016 tentang TKPI) yaitu rekomendasi yang telah dibahas oleh Itjen, klien pengawasan dan UKI, serta disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektorat mitra pengawasan.

### SS 8 SDM yang Kompeten

17. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.

|                           | Tahun 2017     | Tahun 2018  | Tahun 2019     |
|---------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Target                    | 90%            | 100%        | 87%            |
| Realisasi                 | 100%           | 100%        | 92,50%         |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>111,11%</b> | <b>100%</b> | <b>106,32%</b> |

|                           | Tahun 2020  | Tahun 2021  |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Target                    | 100%        | 100%        |
| Realisasi                 | 120%        | 120%        |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>120%</b> | <b>120%</b> |

Realisasi Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2021 adalah sebesar 120%. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. IKU ini dimaksudkan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan

### SS 9 Organisasi yang *fit-for-purpose*

18. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja

|                           | Tahun 2017 | Tahun 2018  | Tahun 2019     |
|---------------------------|------------|-------------|----------------|
| Target                    | n/a        | 70          | 80             |
| Realisasi                 | n/a        | 97,59       | 91,74          |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>-</b>   | <b>120%</b> | <b>114,68%</b> |

|                           | Tahun 2020     | Tahun 2021     |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Target                    | 70             | 75             |
| Realisasi                 | 99,33          | 95,43          |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>114,68%</b> | <b>127,24%</b> |

Tujuan IKU Nilai hasil review pengelolaan kinerja adalah untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 25%
- 2) Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 30%
- 3) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 30%
- 4) Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 15%

Aksi yang dilakukan dalam mencapai target IKU yaitu mendokumentasikan semua pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja di KPKNL Jakarta I dengan lengkap.

#### 19. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

|                           | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Target                    | -          | -          | -          |
| Realisasi                 | -          | -          | -          |
| <b>Persentase capaian</b> | -          | -          | -          |

|                           | Tahun 2020     | Tahun 2021     |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Target                    | 80             | 80             |
| Realisasi                 | 97,39          | 99,55          |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>121,74%</b> | <b>124,44%</b> |

IKU Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai baru diukur di tahun 2020. Tingkat efektivitas FGD kode etik merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), understanding (pemahaman peserta terhadap materi FGD), learning enthusiasm (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), contribution to learning (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai).

Realisasi IKU Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai pada tahun 2021 dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 99,55 dari target 80 dengan persentase capaian sebesar 124,44%.

### SS 10 Pengelolaan Keuangan yang Optimal

#### 3. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

|                           | Tahun 2017  | Tahun 2018     | Tahun 2019     |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Target                    | 95%         | 95%            | 95%            |
| Realisasi                 | 98%         | 98,36%         | 97,62%         |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>103%</b> | <b>103,54%</b> | <b>103,19%</b> |

|                           | Tahun 2020     | Tahun 2021    |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Target                    | 95%            | 95,5%         |
| Realisasi                 | 100%           | 94,48%        |
| <b>Persentase capaian</b> | <b>105,26%</b> | <b>98,93%</b> |

Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar 94,48%. Pencapaian tersebut belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 95,5% dikarenakan walaupun penyerapan anggaran KPKNL Jakarta I bagus, yaitu sebesar 99,42%, namun nilai efisiensi hanya 2,85%.

#### A. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai kegiatan di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I dalam Tahun 2021 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021.

Dari keseluruhan anggaran yang tersedia (PAGU akhir) yaitu sebesar **Rp1.887.614.000,00** pada tahun 2021, dapat terealisasi sebesar Rp1.876.727.175,00 dari pagu yang telah ditetapkan.

Target IKPA tahun 2021 sebesar 95,5% tidak tercapai disebabkan karena penyerapan yang terlalu tinggi mencapai 99,42% menyebabkan nilai efisiensi menjadi rendah.

## A. DATA PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT

| KODE          | RINCIAN OUTPUT   | Pagu Akhir    | Realisasi Anggaran |
|---------------|--|---------------|--------------------|
| 4796.BMB.001  | Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara  | 150.000       | -                  |
| 4796.BMB.002  | Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang  | 1.776.000     | 1.728.800          |
| 4798.AAH.001  | Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara   | 84.456.000    | 83.921.285         |
| 4798.AAH.002  | Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara                                    | 61.092.000    | 59.295.768         |
| 4798.AAH.003  | Risalah Lelang   | 12.908.000    | 12.837.760         |
| 4798.FAE.001  | Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipkatkan (PU)                                    | 150.000       | -                  |
| 4798.FAE.003  | Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) | 21.228.000    | 21.066.000         |
| 4798.FAE.005  | Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara  | 300.000       | -                  |
| 4798.FAE.006  | Rekomendasi Hasil Penilaian  | 3.600.000     | 3.600.000          |
| 4700.EAG.001  | Advokasi Hukum   | 24.628.000    | 24.049.200         |
| 4701.EAC.001  | Operasionalisasi Kantor  | 1.010.881.000 | 1.005.659.625      |
| 4701.EAC.002  | Kerumahtangaan   | 23.128.000    | 22.770.488         |
| 4701.EAD.001  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 197.060.000   | 196.085.849        |
| 4701.EAD.002  | Peralatan Fasilitas Perkantoran  | 25.921.000    | 25.885.600         |
| 4701.EAD.003  | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi   | 35.936.000    | 35.674.200         |
| 4701.EAD.004  | Kendaraan Bermotor   | 375.100.000   | 375.100.000        |
| 4702.BMB.003  | Publikasi  | 4.600.000     | 4.514.600          |
| 4704.EAK.001  | Rekomendasi Kepatuhan Internal   | 4.700.000     | 4.538.000          |
| <i>Jumlah</i> |  | 1.887.614.000 | 1.876.727.175      |

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN serta upaya peningkatan *good governance*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Dalam situasi dan kondisi yang cenderung fluktuatif dan pandemic COVID-19, tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, jajaran KPKNL Jakarta I senantiasa berusaha menghadapi tantang tersebut, sehingga tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IKU secara keseluruhan pada Tahun 2021 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat 2 (dua) IKU yang realisasinya belum mencapai target yang ditentukan.

Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan KPKNL Jakarta I dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Melakukan penggalian potensi penerimaan dari Piutang Negara sehingga outstanding piutang negara dapat ditekan.
2. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara efektif.
3. Meningkatkan kualitas SDM agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi pengguna jasa.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta I, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.



Kepala Kantor,

Wildan Ahmad Fananto



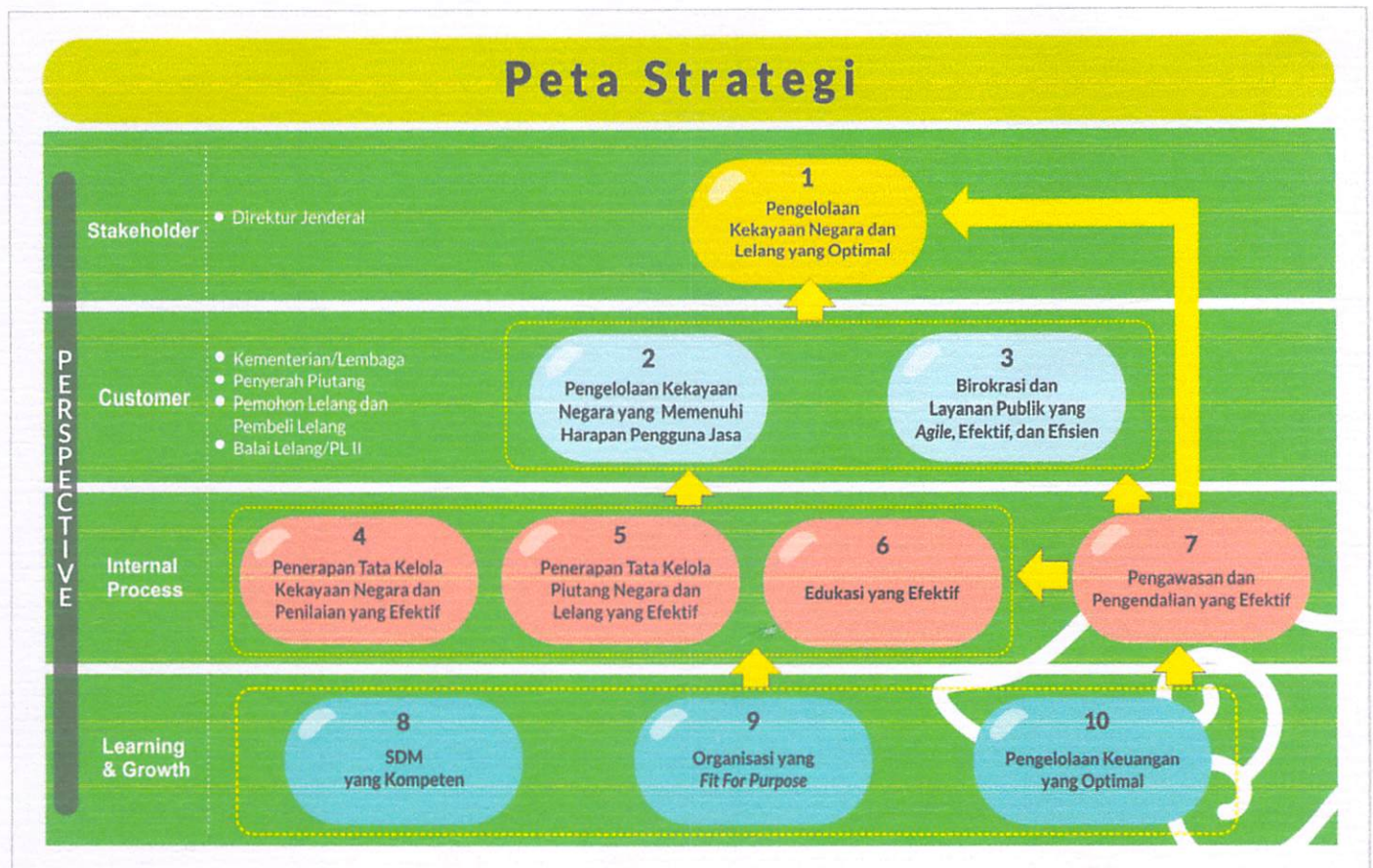
KONTRAK KINERJA  
NOMOR 7/KN.19/2021

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL JAKARTA I  
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL JAKARTA I**  
**KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1.  | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal                   | 1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK                                    | 62%    |
|     |   | 1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)               | 100%   |
|     |   | 1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara                     | 100%   |
| 2.  | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa       | 2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang                        | 90     |
|     |   | 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang  | 100%   |
| 3.  | Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien | 3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL   | 4,64   |
| 4.  | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif      | 4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi                                   | 100%   |
|     |   | 4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)                   | 100%   |
|     |   | 4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian  | 22%    |
| 5.  | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif          | 5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN   | 100%   |
|     |   | 5b-CP Persentase Produktivitas Lelang  | 35%    |
|     |   | 5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i> | 92%    |
|     |   | 5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN  | 12,5%  |
| 6.  | Edukasi yang Efektif  | 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi  | 93     |
| 7.  | Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif                              | 7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara                 | 85%    |
|     |   | 7b-CP Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti                     | 97%    |
| 8.  | SDM yang Kompeten   | 8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai  | 100%   |
| 9.  | Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>                                | 9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja   | 75     |
|     |   | 9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator                          | 80     |
| 10. | Pengelolaan Keuangan yang Optimal                                     | 10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran  | 95,5%  |

| Program/Kegiatan  | Anggaran               |
|---|------------------------|
| <b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b> | <b>Rp342.098.000</b>   |
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi                     | Rp26.609.000           |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko          | Rp32.952.000           |
| 3. Pengelolaan Aset   | Rp282.537.000          |
| 4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara                      |                        |
| 5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara    |                        |
| 6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif            |                        |
| <b>Dukungan Manajemen</b>                                     | <b>Rp1.771.885.000</b> |
| 1. Legislasi dan Litigasi                                     | Rp37.428.000           |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum                        | Rp1.689.075.000        |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik                | Rp20.678.000           |
| 4. Pengelolaan Organisasi dan SDM                             |                        |
| 5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal  | Rp24.704.000           |
| 6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi                 |                        |

Jakarta, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang  
Jakarta I,



Hady Purnomo



Wildan Ahmad Fananto

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL JAKARTA I**  
**KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021**

| No       | SS, IKU  | Target |       |       |       |         |       |       |
|----------|--|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
|          |  | Q1     | Q2    | Smt 1 | Q3    | s.d. Q3 | Q4    | Y     |
| <b>1</b> | <b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>                       |        |       |       |       |         |       |       |
| 1a-CP    | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK                                    | -      | 50%   | 50%   | 55%   | 55%     | 62%   | 62%   |
| 1b-CP    | Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)               | 10%    | 30%   | 30%   | 60%   | 60%     | 100%  | 100%  |
| 1c-CP    | Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara                     | 25%    | 50%   | 50%   | 75%   | 75%     | 100%  | 100%  |
| <b>2</b> | <b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>           |        |       |       |       |         |       |       |
| 2a-CP    | Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang                        | 90     | 90    | 90    | 90    | 90      | 90    | 90    |
| 2b-CP    | Persentase Realisasi Pokok Lelang  | 20%    | 40%   | 40%   | 70%   | 70%     | 100%  | 100%  |
| <b>3</b> | <b>Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien</b>      |        |       |       |       |         |       |       |
| 3a-CP    | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL   | -      | -     | -     | -     | -       | 4,64  | 4,64  |
| <b>4</b> | <b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif</b>          |        |       |       |       |         |       |       |
| 4a-CP    | Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi                                   | -      | 20%   | 20%   | 60%   | 60%     | 100%  | 100%  |
| 4b-CP    | Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)                   | 15%    | 45%   | 45%   | 75%   | 75%     | 100%  | 100%  |
| 4c-CP    | Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian  | 22%    | 22%   | 22%   | 22%   | 22%     | 22%   | 22%   |
| <b>5</b> | <b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>              |        |       |       |       |         |       |       |
| 5a-CP    | Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN   | 25%    | 50%   | 50%   | 75%   | 75%     | 100%  | 100%  |
| 5b-CP    | Persentase Produktivitas Lelang  | 15%    | 20%   | 20%   | 25%   | 25%     | 35%   | 35%   |
| 5c-CP    | Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i> | 92%    | 92%   | 92%   | 92%   | 92%     | 92%   | 92%   |
| 5d-CP    | Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN  | 12,5%  | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5%   | 12,5% | 12,5% |
| <b>6</b> | <b>Edukasi yang Efektif</b>  |        |       |       |       |         |       |       |
| 6a-N     | Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi                                       | -      | 93    | 93    | -     | 93      | 93    | 93    |
| <b>7</b> | <b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>                                  |        |       |       |       |         |       |       |
| 7a-CP    | Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara                 | -      | 40%   | 40%   | -     | 40%     | 85%   | 85%   |
| 7b-CP    | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti                     | -      | -     | -     | -     | -       | 97%   | 97%   |
| <b>8</b> | <b>SDM yang Kompeten</b>   |        |       |       |       |         |       |       |
| 8a-N     | Persentase pengembangan kompetensi pegawai                                       | 15%    | 40%   | 40%   | 75%   | 75%     | 100%  | 100%  |

| No        | SS, IKU  | Target |       |       |       |            |       |       |
|-----------|--|--------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|
|           |  | Q1     | Q2    | Smt 1 | Q3    | s.d.<br>Q3 | Q4    | Y     |
| <b>9</b>  | <b>Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i></b>            |        |       |       |       |            |       |       |
| 9a-N      | Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja                          | -      | -     | -     | -     | -          | 75    | 75    |
| 9b-N      | Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator | 80     | 80    | 80    | 80    | 80         | 80    | 80    |
| <b>10</b> | <b>Pengelolaan Keuangan yang Optimal</b>                 |        |       |       |       |            |       |       |
| 10a-CP    | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran                 | 95,5%  | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5%      | 95,5% | 95,5% |

Jakarta, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang  
Jakarta ,



Wildan Ahmad Fananto

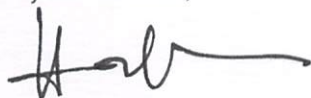
### Sasaran Kerja Pegawai

| No | I. PEJABAT PENILAI     |   | No | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI |   |
|----|------------------------|---|----|---------------------------------------|---|
| 1  | Nama                   | Hady Purnomo  | 1  | Nama                                  | Wildan Ahmad Fananto  |
| 2  | NIP                    | 196103101991031001  | 2  | NIP                                   | 196705131993031001  |
| 3  | Pangkat/<br>Gol. Ruang | Pembina Utama Madya / IV.d  | 3  | Pangkat/<br>Gol. Ruang                | Pembina TK.I / IV.b   |
| 4  | Jabatan                | Kepala Kantor Wilayah<br>Direktorat Jenderal Kekayaan<br>Negara DKI Jakarta | 4  | Jabatan                               | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan<br>Negara dan Lelang Jakarta I |
| 5  | Unit Kerja             | Kantor Wilayah Direktorat<br>Jenderal Kekayaan Negara<br>DKI Jakarta        | 5  | Unit Kerja                            | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara<br>dan Lelang Jakarta I        |

| No | III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN                                      | ANGKA<br>KREDIT | TARGET                |                    |          |                 |
|----|--|-----------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|
|    |  |                 | KUANTITAS<br>/ OUTPUT | KUALITAS<br>/ MUTU | WAKTU    | BIAYA           |
| 1  | Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK                     | -               | 62%                   | 100                | 12 bulan | -               |
| 2  | Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)   | -               | 100%                  | 100                | 12 bulan | -               |
| 3  | Menurunkan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara                     | -               | 100%                  | 100                | 12 bulan | -               |
| 4  | Mewujudkan Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang          | -               | 90                    | 100                | 12 bulan | -               |
| 5  | Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang                                    | -               | 100%                  | 100                | 12 bulan | -               |
| 6  | Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL                      | -               | 4,64                  | 100                | 12 bulan | -               |
| 7  | Mensertifikasi Bidang tanah BMN  | -               | 100%                  | 100                | 12 bulan | -               |
| 8  | Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)             | -               | 100%                  | 100                | 12 bulan | -               |
| 9  | Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian                               | -               | 78%                   | 100                | 12 bulan | -               |
| 10 | Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN                             | -               | 100%                  | 100                | 12 bulan | -               |
| 11 | Meningkatkan Produktivitas Lelang                                      | -               | 35%                   | 100                | 12 bulan | -               |
| 12 | Melaksanakan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i> | -               | 92%                   | 100                | 12 bulan | -               |
| 13 | Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN                         | -               | 87,5%                 | 100                | 12 bulan | -               |
| 14 | Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi                        | -               | 93                    | 100                | 12 bulan | -               |
| 15 | Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara                | -               | 85%                   | 100                | 12 bulan | -               |
| 16 | Menindaklanjuti Rekomendasi hasil pengawasan                           | -               | 97%                   | 100                | 12 bulan | -               |
| 17 | Mengembangkan kompetensi pegawai                                       | -               | 100%                  | 100                | 12 bulan | -               |
| 18 | Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja                             | -               | 75                    | 100                | 12 bulan | -               |
| 19 | Melaksanakan FGD Pejabat Administrator                                 | -               | 80                    | 100                | 12 bulan | -               |
| 20 | Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran                             | -               | 95,5%                 | 100                | 12 bulan | Rp2.113.983.000 |

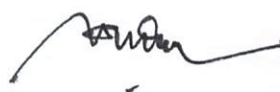
Jakarta, 29 Januari 2021

Pejabat Penilai,



Hady Purnomo  
NIP 196103101991031001

PNS yang Dinilai,

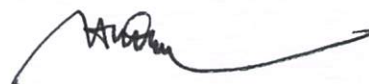


Wildan Ahmad Fananto  
NIP 196705131993031001

**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL JAKARTA I**  
**KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2021**

| No | Indikator Kinerja Utama   | Inisiatif Strategis     | Output/ Outcome  | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab                                   | Biaya |
|----|---|-------------------------|--|---------------------|--|-------|
| 1  | SS:<br>Pengelolaan kekayaan negara yang optimal<br><br>IKU:<br>Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | Optimalisasi BMN (KOIN) | 1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat<br><br>2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya | 12 Bulan            | Tim KPKNL beranggotakan 5 orang pejabat /pelaksana |       |

Jakarta, 29 Januari 2021  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I



Wildan Ahmad Fananto  
NIP 196705131993031001

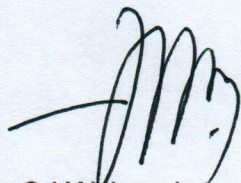
**LEMBAR PENETAPAN**  
**PERUBAHAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bersama ini ditetapkan kembali manual IKU Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I untuk periode Kontrak Kinerja Tahun 2021 yang mengalami perubahan pada manual IKU:

a. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi

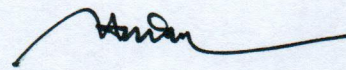
| Raw Data sebelumnya | Menjadi         |
|---------------------|-----------------|
| 23 bidang tanah     | 22 bidang tanah |

Kepala Seksi Kepatuhan Internal,



Sri Wahyuni  
NIP 19710602 199603 2 001

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2021  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Jakarta I,



Wildan Ahmad Fananto  
NIP 19670513 199303 1 001

**BAGAN ORGANISASI**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR**  
**154/PMK.01/2021**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

